

Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud

Alwein Majampoh
Joyce J. Rares
Helly Kolondam

Abstract : The purpose of this study was to determine how camat role in empowering communities in the district Rainis Talaud islands district. The method used is descriptive qualitative method. The focus of research includes : The subdistrict governments to encourage public participation in development planning in the district; role to guide the work units implementing the program/community development activities in the district; successful research informants interviewed as many as 10 persons namely : 2 sub-district government officials, 2 village heads 2, 2 Orang LMP members, two community leaders, and two villagers data collection techniques used were interviews. Data was analysed using qualitative descriptive analysis techniques-interactive model of Miles and Huberman. Based on the results of the study conclude : (1) role to encourage public participation in development planning in the discussion forum of development planning in the district has done fairly well; (2) role to provide guidance to the working units of government and community organization in the district have been done fairly well ; (3) role in empowering communities through the role to supervise the program/community development activities whether perpetrated by units of government work and civil society organizations have also done fairly well. Based on these conclusions suggested : (1) let more active in mobilizing the community to engage in development planning at the village and sub-district; (2) let more effective coordination meeting forum/consultation on guidance to the work units that acted upon program/activities of people in the district pemberdayaan; (3) let improve the implementation of monitoring/pemantauan and reporting systems on a regular basis about the implementation of program/community development activities in the district.

Key words : The role of community empowerment.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususnya serta potensi dan keragaman daerah. Melalui otonomi seluas-luasnya, pemerintah daerah

lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat ilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain tugas tersebut camat mengembangkan tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di Wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerinah lainnya di Wilayah Kecamatan (PP.19 Tahun 2008).

PP. No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, antara lain menyebutkan bahwa salah satu tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat adalah mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan, yang meliputi : mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir ini banyak program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama program pemberdayaan masyarakat golongan bawah atau masyarakat kurang mampu, baik program yang bersifat nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, maupun program dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Badan Keluarga Berencana, dan Dinas/Badan Daerah lainnya. Sesuai dengan ketentuan PP.19 Tahun 2008, bahwa pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan adalah berada dalam koordinasi oleh camat dalam kedudukan/statusnya selaku kepala Wilayah kerja Kecamatan. dengan demikian camat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan.

Kecamatan Rainis merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang sebagian penduduknya masih tergolong kurang mampu. Dari 1329 kepala keluarga yang ada di kecamatan tersebut hanya sebanyak 125 KK (9,41%) yang sudah tergolong pada Keluarga Sejahtera Tahap III dan 350 KK (26,33%) tergolong Keluarga Sejahtera Tahap II, sedangkan sebanyak 854

KK (64,26%) masih tergolong pada Keluarga Sejahtera Tahap I dan Keluarga Prasejahtera. Oleh karena itu, Kecamatan Rainis merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dari data yang diperoleh bahwa di wilayah Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat beberapa program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah atau sedang dilaksanakan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, program pemberdayaan usaha kecil melalui bantuan permodalan, program pengembangan usaha ekonomi produktif, program peningkatan keterampilan berusaha, dan program pembinaan partisipasi sosial masyarakat.

Sesuai dengan arahan PP.19 Tahun 2008 sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat meliputi : (1) peranan mendorong partisipasi masyarakat untuk, ikutserta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan di kecamatan; (2) peranan melakukan pembinaan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah yang mempunyai atau melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; dan (3) peranan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan. Namun dari pengamatan yang dilakukan ada indikasi menunjukkan bahwa peranan tersebut belum dilakukan secara optimal di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal itu dapat diindikasikan oleh beberapa kenyataan seperti adanya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dari unit-unit kerja pemerintah kurang atau tidak mengarah pada pemberdayaan masyarakat kelompok sasaran contoh kegiatan yang dibiayai oleh dana

PNPM Mandiri yang seharusnya diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin (seperti pelatihan keterampilan berusaha, bantuan modal usaha), pada kenyataannya lebih banyak digunakan untuk pembangunan proyek fisik seperti pembuatan jalan, jembatan desa. Program dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi/unit kerja pemerintah seperti program/kegiatan pelatihan keterampilan dan kemampuan berusaha yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, program/kegiatan penyuluhan KB oleh Badan Keluarga Berencana Daerah, program/kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi keluarga oleh Dinas Kesehatan seringkali kurang mendapat respons atau dukungan partisipasi masyarakat setempat sehingga hasil yang diharapkan menjadi kurang maksimal.

Beberapa permasalahan tersebut dapat mengindikasikan belum optimalnya peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui peranan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan melalui peranan membina dan mengawasi unit-unit kerja pemerintah di kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat. Indikasi masalah tersebut nampaknya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam melalui suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu dalam rangka penulisan skripsi penulis tertarik mengangkat tema/judul penelitian “Peranan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud”.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peranan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud ?”

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana “Peranan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud”

2. Manfaat Penelitian :

a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya bidang studi administrasi pembangunan.

b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud di dalam menetapkan kebijakan ataupun langkah-langkah konstruktif untuk meningkatkan peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Pasolong (2013), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Sugiono (2009) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Fokus Penelitian

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah, peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat. Peranan adalah sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya/kedudukannya dalam masyarakat atau organisasi; dengan kata lain peranan adalah suatu perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu (Thoha, 2006).

Dengan demikian, peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh camat dalam pemberdayaan masyarakat sesuai status atau kedudukannya sebagai Kepala Wilayah kerja Kecamatan. Sesuai dengan UU.No.32 Tahun 2004 (pasal 126) dan PP. No.19 Tahun 2008 (pasal 16), peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat meliputi : (1) peranan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) peranan melakukan “pembinaan” terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun nonpemerintah yang mempunyai dan melaksanakan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan; dan (3) peranan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

C. Jenis Data

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

➤ Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif. Data primer inilah yang dianalisis untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian.

➤ Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus yang diteliti di kantor camat

ataupun di instansi-instansi terkait yang ada di Wilayah kerja Kecamatan. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data kuantitatif ataupun kualitatif yang berfungsi sebagai penunjang/pendukung data primer.

D. Sumber Data/Informan

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan sumber data (informan) yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* atau pengambilan informan dengan sengaja (Sugiono (2009).

Sumber data atau informan dalam penelitian ini diambil dari berbagai unsur yang terkait langsung atau tidak langsung dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, baik unsur pemerintah kecamatan, unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, maupun unsur organisasi masyarakat dan warga masyarakat umum. Jumlah informan yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yaitu sebagai berikut :

- Camat, Sekcam atau Kasie PMD : 2 orang
- Pemerintah Desa : 2 orang
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) : 2 orang
- Organisasi Masyarakat (sosial, Keagamaan, dll) : 2 orang
- Tokoh/Pemuka Masyarakat : orang 2

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2006; Bungin, 2010). Berdasarkan pendapat tersebut maka instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri; sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut :

- Wawancara (interview). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari informan yang ditetapkan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.
- Pengamatan (observasi). Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang diteliti yaitu kinerja camat dalam pelaksanaan koordinasi program pemberdayaan masyarakat.
- Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian yaitu Kantor Camat Rainis dan pada instansi yang terkait di Wilayah kerja Kecamatan Rainis.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Hubermann (Sugiono, 2014). Proses analisis data model interaktif diawali dengan kegiatan mempelajari dan menelaah data (*data collection*), kemudian dilanjutkan dengan reduksi data (*data reduction*), selanjutnya penyajian data (*data display*), dan berakhir pada pembuatan kesimpulan atau verifikasi (*conclust drawing and verivication*). Model analisis interaktif dari Meles dan Hubernann tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini (Rohidi & Mulyarto, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Rainis

1. Letak, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk

Kecamatan Rainis merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Rainis termasuk Kecamatan tua di Kabupaten Kepulauan Talaud, terbentuk sejak Tahun 1965. Pada Zaman Hindia Belanda sampai sebelum terbentuk pada Tahun 1965 Rainis hanya merupakan satu desa yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada Tahun 1893, dan pada Tahun 1895 ditetapkan menjadi satu Kecenderukan. Kecamatan Rainis yang ada sekarang initerletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tampan Amma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Beo.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka penelitian tentang peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dilihat dari tiga hal yaitu : perananmendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan; peranan melakukan pembinaan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat yang

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan peranan melakukan pengawasan terhadap berbagai program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit-unit kerja pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Rainis ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan telah dilakukan dengan cukup baik yaitu dengan mengikutsertakan semua elemen masyarakat yang terkait dengan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
- Peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran melakukan pembinaan terhadap unit-unit kerja pemerintah dan organisasi masyarakat di Wilayah Kecamatan telah dilakukan dengan cukup baik melalui rapat koordinasidan rapat konsultasi tingkat kecamatan.
- Peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran melakukan pengawasan terhadap program/kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit-unit kerja pemerintah maupun organisasi-organisasi masyarakat juga telah dilakukan dengan cukup baik melalui permintaan laporan dari unit-unit kerja pemerintah dan organisasi masyarakat, dan melalui monitoring atau pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- Peranan camat mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa perlu ditingkatkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Camat hendaklah lebih aktif di dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat desa maupun kecamatan.
- Peranan camat dalam membina unit-unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan. Camat hendaklah lebih mengefektifkan forum rapat koordinasi/konsultasi untuk pembinaan terhadap unit-unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.
- Peranan camat lakukan pengawasan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan Pelaksanaan monitoring/pemantauan dan penerapan system pelaporan secara baik dan benar serta dilakukan secara rutin berkala tentang pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi, R., 2008, *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Kartasasmita G., 1996, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, Pustaka Sidesindo.

Moleong, L.J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Pasolong Harbani, 2013, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.

Rohidi dan Moeljarto, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.

-----, 2004, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik : Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

-----, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.

Suhendra, K. 2006, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.

Thoha, M., 2006, *Perilaku Organisasi*, Jakarta, Rajawali Press.

Suharto, E., 1997 *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikiran*, Bandung, Lembaga Studi Pembangunan STKS.

Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.